BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Sebuah penelitian bisa dikatakan ilmiah apabila penelitian tersebut didukung dengan teori-teori yang sudah ada sebelumnya, dengan menuliskan tinjauan pustaka atau kajian teorinya.

Penelitian ini berawal dari pembahasan laporan keuangan pada pemerintah derah yang mencakup mengenai neraca daerah kemudian membahas mengenai akuntabilitas publik pada pemerintah daerah, serta membahas implikasinya terhadap kinerja.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pengaruh penyajian neraca daerah terhadap akuntabilitas publik dan implikasinya terhadap kinerja.

2.1.1 Penyajian Neraca Daerah

2.1.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Sundjaja dan Barlian (2001:47) Laporan Keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan.

Menurut Nunuy Nur Afiah (2010) semua pendapatan dan pengeluaran dicatat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), adapun jenis-jenis pencatatannya akuntansi, yaitu :

1. Akuntansi Berbasis Anggaran *(Budgetary Based Accounting)*
   Akuntansi anggaran adalah akuntansi yang mencatat, mengklasifikasi, dan mengiktisarkan transaksi berdasarkan anggaran pendapatan ataupun belanja. Istilah "akuntansi anggaran" mengacu pada praktik yang dijalankan oleh beberapa pemerintah negara bagian di Amerika Serikat pada tahun 1950–an. Sistem akuntansi ini memasukkan jumlah yang dianggarkan dan jumlah aktual dalam catatan ganda. Jumlah pemasukan yang dianggarkan dimasukkan dalam pos kredit, kemudian sebagai pengeluaran debit dimasukkan sebagai penyeimbang dari kredit tadi. Keseimbangan rekening memperlihatkan jumlah anggaran yang masih belum dibelanjakan. Kendala utama perhitungan sistem akuntansi anggaran adalah kompleksitas penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan. Untuk menyederhanakan kerumitan ini, maka dilakukan pembandingan yang sistematik dan berkelanjutan antar – angka aktual dan angka anggaran, tanpa melalui proses penjurnalan anggaran, melainkan cukup mengandalkan data anggaran yang telah direkam dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Akuntansi Berbasis Kas *(Cash Based Accounting)*
   Akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Pengukurannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Akuntansi berbasis kas ini meliputi saldo kas, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Keterbatasannya adalah keterbatasan informasi yang dihasilkan karena terbatas pada pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan pertanggungjawaban manajemen atas aktiva dan kewajiban.
3. Akuntansi Berbasis Akrual *(Accrual Based Accounting)*
   Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokusnya pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Sistem akuntansi ini merupakan sistem yang paling modest.
4. Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual *(Cash Toward Accrual Based Accounting)*
   Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
   Menurut Achmad Djuaeni Kadmasasmita (2009) "reformasi" atau

"paradigma baru" erat kaitannyan dengan Keuangan Negara yang merupakan paradigma yang menuntut besarnya akuntabilitas dan transparansi dari penataan

keuangan negara dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dari *Vertical Accountability* menjadi *Horizontal Accountability*.
   Jika selama ini pertanggungjawaban atas penataan keuangan negara lebih ditujukan pada pemerintah yang lebih tinggi (Provinsi atau Pusat), maka dengan reformasi saat ini pertanggungjawaban lebih ditujukan kepada rakyat (DPR). Laporan pertanggungjawaban keuangan negara disampaikan kepada DPR secara periodik, tidak lagi sekedar laporan tentang APBN tetapi mencakup pula laporan Aliran Kas dan Neraca.
2. Dari *Traditional Budget* menjadi *Performance Budget.*
   Selama ini penataan keuangan negara adalah dengan sistem tradisional. Sistem tradisional, sistem penyusunannya adalah dengan pendekatan *incremental* dan "*line item"* dengan penekanan pada pertanggungjawaban pada setiap input yang dialokasikan. Melalui reformasi, anggaran harus disusun dengan pendekatan atau sistem anggaran kinerja (*performance budgeting*), dengan penekanan pertanggunganjawaban tidak sekedar pada input tetapi juga pada *output* dan *outcome.*
3. Dari Pengendalian dan Audit Keuangan ke Pengendalian dan Audit Keuangan, dan Kinerja.
   Sebelum reformasi terdapat pengendalian dan audit keuangan negara, bahkan juga audit kinerja. Namun, oleh karena sistem anggaran yang tidak memasukan kinerja, maka proses audit kinerja menjadi tidak berjalan dengan baik. Dalam reformasi ini, oleh karena sistem penganggaran yang mengunakan sistem penganggaran kinerja *(performance budgeting)* maka pelaksanaan pengendalian dan audit keuangan negara dan audit kinerja akan menjadi lebih baik.
4. Lebih Menerapkan Konsep *Value for Money.*
   Reformasi penataan keuangan Negara saat ini menghendaki penerapan konsep *value for money* atau yang lebih dikenal degan konsep 3E (Ekonomi, Efisien, dan Efektif). Oleh karena itu dalam reformasi ini pemerintah diminta baik dalam mencari dana maupun menggunakan dana selalu menerapkan prinsip 3 E tersebut. Hal ini mendorong pemerintah berusaha selalu memperhatikan tiap sen/rupiah dan (uang) yang diperoleh dan digunakan. Perhatian tertuju pada hubungan antara *input – output – outcome.*
5. Penerapan Pusat Pertanggungjawaban.
   Dalam reformasi penataan keuangan Negara ini konsep pusat pertanggungjawaban (*responsibility center*) diterapkan. Penerapan ini akan memudahkan pengukuran kinerja setiap unit organisasi. Pada konsep ini unit organisasi dapat diperlakukan sebagai pusat pertanggungjawaban pendapatan (*revenue*) seperti dinas pendapatan, biaya (*expense*) seperti bagian keuangan. "laba" (profit), dan investasi seperti BUMD atau Perusahaan Daerah.

6. Perubahan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan.
   Untuk mendukung perubahan-perubahan yang telah dikemukakan di atas direformasi pula sistem akuntansi di pemerintahan. Jika selama ini pemerintah menggunakan sistem pencatatan tunggal (*single entry system*) maka dirubah menjadi sistem ganda (*double entry system*). Selain itu, selama ini digunakan pencatatan atas dasar kas (*cash-basis*) maka dirubah menjadi atas dasar actual medication (*modified accrual basis*). Selain itu, perubahan dalam akuntansi dan pengelolaan negara, yang pada gilirannya menuntut adanya neraca laporan negara, tidak lagi sekedar laporan perhitungan keuangan negara.
   Menurut Dita Afrianti (2011) Laporan Keuangan pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan, informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Di dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif, antara lain :

   1. Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :
      a. Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka pada masa lalu.
      b. Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
      c. Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
      d. Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut :
   a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
   b. Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
   c. Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
   Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundangundangan, maka akan menimbulkan permasalahan.
4. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundangundangan, maka akan menimbulkan permasalahan.

2.1.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Dalam Susetya Dwiningsih dan Pepie Diptyana (2008) tujuan umum Laporan Keuangan Pemerintah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Dalam SAP No. 1 Par:9 secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Dalam Susetya Dwiningsih dan Pepie Diptyana (2008) Laporan Keuangan Pemerintah untuk tujuan umum juga mempunyai kemampuan prediktif dan prospektif dalam hal memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Pengguna laporan keuangan pemerintah adalah:

1. Masyarakat
2. Para wakil rakyat, lembaga pemeriksa dan lembaga pengawas
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
4. Pemerintah.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah baik pusat dan daerah harus memiliki karakteristik dasar sebagai berikut: keterpahaman (understandability), keterandalan (reliability), keberpautan (relevance), ketepatwaktuan (timeliness), ketaatasasan (consistency), dan keterbandingan (comparability).

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2011) Laporan keuangan yang dihasilkan dari pencatatan transaksi keuangan pada SKPD berupa :

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Catatan atas Laporan Keuangan

Masih dalam Abdul Hafiz Tanjung (2011) pada tingkat SKPKD laporan keuangan yang dihasilkan dari pencatatan transaksi keuangan berupa :

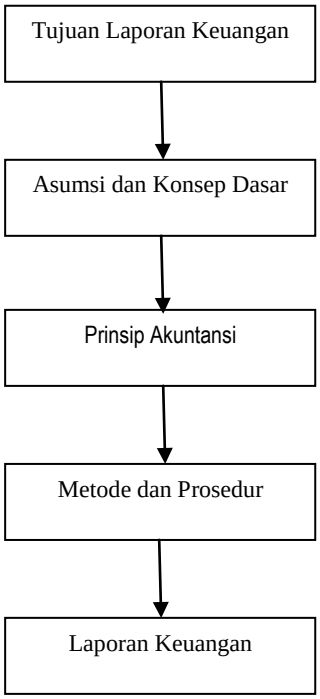
1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2011) pada akhir tahun melalui mekanisme konsolidasi dihasilkan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan berupa :

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

Menurut Mardiasmo (2002) Akuntansi selama ini didefinisikan (perspektif jasa) sebagai suatu kegiatan jasa. Dalam AICPA, Statement Accounting Board, New York, (1970) dalam Mardiasmo (2002) fungsi akuntansi adalah

menyediakan data kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih alternatif dari suatu keadaan.



Gambar 2.1 Hubungan Konsep, Prinsip, Metode, dan Laporan Keuangan

Menurut Mardiasmo (2002) tujuan pelaporan keuangan seperti dalam gambar di atas adalah :

1. Laporan keuangan berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, termasuk identifikasi masalah-masalah yang memerlukan keputusan kritis serta penetapan sasaran-sasaran tertentu. Informasi yang dihasilkan harus memadai.
2. Membantu para pengambil keputusan untuk melakukan estimasi terhadap jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari penerimaan uang masa yang akan datang. Atau dengan kata lain menyediakan informasi sebagai dasar pengarahan dan pengendalian seluruh sumber daya dalam suatu organisasi.
3. Mampu menunjukkan sumber-sumber ekonomi dari suatu perusahaan, klaim atas sumber tersebut dan pengaruh dari transaksitransaksi yang terjadi, kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan yang mempengaruhi sumber-sumber dan klaim atas sumber-sumber tersebut.

Menurut Mardiasmo (2002) ketiga karakteristik informasi tersebut di atas akan menjadi pedoman dalam penyusunan pelaporan keuangan suatu badan usaha atau organisasi, dari uraian di atas kiranya dapat dipahami benang merah antara *good governance* dengan akuntansi sektor publik, hubungan keduanya adalah akuntansi sektor publik sebagai alat untuk melakukan upaya elaborasi *good governance* ke tataran yang lebih riil. Masih dalam Mardiasmo (2002) artikulasi dan elaborasi yang dimaksudkan dapat melalui akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan audit atau pemeriksaan sektor publik, ketiga alat ini sangat memperhatikan pilar-pilar *good governance* dalam *body of knowledge* yang telah dibangunnya, dengan menerapkan ketiganya pada proses ekonomi atau operasi sektor publik maka di lapangan akan tercipta atmosfer *check and balance*.

Menurut GASB (1999) dalam Mardiasmo (2002), adapun tujuan laporan keuangan sektor publik adalah:

1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya (*demonstrating accountability*)
2. Melaporkan hasil operasi (*reporting operating result*)
3. Melaporkan kondisi keuangan (*reporting financial condition*)
4. Melaporkan sumber daya jangka panjang (*reporting long live resources*)

Menurut Mardiasmo (2006)tujuan laporan keuangan sektor publik di atas bila disimak ternyata lebih berat jika dibandingkan dengan pihak swasta, terlihat bahwa di samping fungsi manajerial juga nampak fungsi pertanggungjawaban untuk mampu memenuhinya maka harus dihasilkan informasi yang bersifat umum yang mampu memenuhi kepentingan para manajemen pemerintah, politikus, dan publik.

Merujuk Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah daerah merupakan bagian integral dari pemerintah pusat atau dengan kata lain merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan bagi pemerintah pusat. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok – pokok Pemerintahan di Daerah yang dinilai tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah dan perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini. Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Pasal 26 Undangundang Nomor 25 Tahun 1999 terutama mengenai pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan desentralisasi, ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, peraturan tersebut memberikan pedoman yang bersifat umum dan lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat prinsip, normatif, dan asasi yang merupakan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tercantum dalam PP Nomor 105 Tahun 2000 Pasal 14 ayat 1, 2, dan 3 adapun pengaturan tentang pengelolaan keuangan daerah adalah:

1. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah ditetapkan oleh masing-masing daerah dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah masing-masing sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut. Tujuan pelaporan keuangan organisasi nirlaba menurut Statement of Financial Accounting Concepts No. 4 dalam Mardiasmo (2002) adalah: bermanfaat bagi penyusunan keputusan yang rasional, untuk menilai pelayanan, menilai kinerja manajer organisasi, memberi informasi tentang sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan, informasi kinerja selama

satu periode, informasi bagaimana memperoleh dan membelanjakan kas, memberi penjelasan dan intepretasi. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Dalam PP No. 24 Tahun 2005 komponen laporan keuangan pokok pemerintah terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, selain laporan keuangan pokok, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah di Indoensia diatur dalam UU No. 13 tahun 2005 tentang Keuangan Negara dan UU No. I tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sementara itu, penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah di Indoensia berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diatur melalui PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.1.1.3 Neraca Daerah

Menurut Mulyono (2006) neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu, lebih khusus lagi, neraca pemerintah daerah memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Dalam Permen No. 9 Tahun 2007 Kinerja lnstansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia neraca merupakan cermin utama untuk melihat apa yang ada di republik, terutama menyangkut hal-hal yang salah urus atau hal-hal yang tidak diurus maupun yang belum diurus.

Sesuai ketentuan PP 24 Tahun 2005 Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah dan laporan ini sangat penting artinya bagi manajemen pemerintah daerah bukan hanya untuk memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Seperti halnya dalam dunia usaha banyak pihak yang sangat berkepentingan terhadap Neraca daerah, bukan hanya pihak eksekutif daerah saja tetapi juga legislatif, masyarakat dan pengguna lainnya untuk mengetahui kualitas aset yang dimiliki oleh daerah dan bagaimana pengelolaannya apakah telah dilakukan secara efisien dan efektif dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat (Shiddiq Nr. ALK. *Analisis Laporan Neraca.* Diakses pada 11 November, 2011 dari Word Wide Web : http://www.google.co.id/ *images.shiddiqnr.multiply.multiplycontent.com*).

Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti , Kepala daerah dan Kepala Biro/Bagian Keuangan serta Kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditor/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu (Shiddiq Nr. ALK. *Analisis Laporan Neraca.* Diakses pada 11 November, 2011 dari Word Wide Web : http://www.google.co.id/ *images.shiddiqnr.multiply.multiplycontent.com*).

Secara teoritis, arti penting Neraca daerah bagi manajemen pemerintahan daerah adalah:

1. Memberikan informasi kepada manajemen Pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan daerah. Artinya Neraca akan memberikan informasi tentang aset-aset Pemerintah Daerah yang dapat dijadikan uang kas dalam waktu dekat atau dalam satu tahun anggaran dan kewajibankewajiban yang jatuh tempo dalam satu tahun anggaran berikutnya.
2. Memberikan informasi kepada manajemen Pemerintah Daerah tentang fleksibilitas keuangan (*financial flexibility*) yaitu kemampuan menggunakan aset-aset keuangan untuk beradaptasi atau menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi.
3. Mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif. Artinya dengan adanya neraca, maka segala kebijakan yang dibuat oleh manajemen pemda akan tercermin di dalam informasi yang disajikan secara transparan di dalam Neraca dan masyarakat dapat menilai hasil-hasil dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang tercermin dalam Neraca.
   Pemerintah Daerah perlu mengetahui kualitas aset yang dimiliki, aset mana yang harus dipelihara dan mana yang sudah tidak ekonomis lagi sehingga harus dijual atau dihapuskan. Demikian juga dengan kewajiban, perlu diketahui berapa sebenarnya kewajiban yang segera jatuh tempo dan belum jatuh tempo, untuk dapat memprediksi pembayaran atau pembiayaannya. Selanjutnya dari semua itu dapat diketahui apakah ekuitas dana cenderung menurun atau meningkat setiap tahun, sehingga dengan *early warning system*, bila ekuitas menuju ke negatif, akan diketahui bahwa kewajiban lebih besar daripada aset yang dimiliki pemerintah daerah.

(Shiddiq Nr. ALK. *Analisis Laporan Neraca.* Diakses pada 11 November, 2011 dari Word WideWeb : http: //www.google.co.id/images.shiddiqnr.multiply.com)

Menurut Manoegra (2007) adapun kriteria Akuntabilitas Laporan Keuangan :

1. Penyajian laporan neraca tepat waktu
2. Pertanggungjawaban dana publik
3. Adanya pemeriksaan/respon (audit) pemerintah

Dalam PSAK No. 1, laporan keuangan disebut relevan jika berguna bagi pengguna informasi untuk mengambil keputusan. Sedangkan laporan keuangan disebut andal jika dapat mememenuhi syarat sebagai berikut :

1. Berguna untuk pengambilan keputusan
2. Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan.
3. Menggambarkan substansi ekonomi dari sesuatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya
4. Netral, yaitu bebas dari keberpihakan
5. Mencerminkan kehati-hatian
6. Mencakup semua hal yang material

Dalam Halim (2007) variabel-variabel untuk meneliti kinerja keuangan daerah :

1. Rasio Kemandirian
   Rasio kemandirian adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Rasio Efektivitas
   Rasio efektivitas adalah tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan.
3. Rasio Efisiensi
   Rasio efisiensi adalah tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai dengan membandingkan realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dengan merealisasikan pendapatan.
4. Rasio Keserasian Belanja

Rasio keserasian adalah rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur dan belanja pelayanan publik secara optimal.

2.1.2.1 Akuntabilitas

Osborne (1992) dalam Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana, pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain, apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban diserahkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai, dan lain sebagainya.

Dalam SAP Tahun 2005 Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Menurut Stanbury (2003) Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam Achamad Djunaedi Kadmasasmita (2010) Akuntabilitas sebagai *decision makers (in government, private sector, and citizens groups) must answer to the public as well as to their own organization,* dewasa ini sering digabungkan

dengan *rule of law*, *transparancy*, *responsiveness*, *equity*, serta *effectiveness* dan *efficiency*, untuk mewujudkan *good governance.* Keuangan Negara sebagai kegiatan (pemerintah) di dalam mencari sumber-sumber dana *(sources of fund),* dan kemudian bagaimana dana tersebut digunakan *(uses of fund),* untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah, dewasa ini sering dikaitkan dengan akuntabilitas, menjadi akuntabilitas keuangan negara, untuk mewujudkan *good governance,* tuntutan untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara tersebut, membutuhkan komitmen, integritas, dan kompetensi manajerial dan teknis dalam penataan keuangan Negara khususnya, serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Menurut Achamad Djunaedi Kadmasasmita (2010) Konsep Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme (baik secara konstitusional maupun keabsahan dalam bentuknya) yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan kinerja perilakunya, akuntabilitas membutuhkan keterbukaan dan kejelasan serta keterhubungan dengan kebebasan media, aplikasi akuntabilitas atau bertanggung-jawab/bertanggung-gugat dalam penyelenggaraan pemerintahan diawali pada saat penyusunan program pelayanan publik dan pembangunan *(program accountability),* pembiayaannya *(fiscal accountability),* pelaksanaan, pemantauan dan penilaiannya (*process accountability*) sehingga program tersebut dapat memberikan hasil atau dampak seoptimal mungkin sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ditetapkan *(outcome accountability).*

Menurut Mardiasmo (2006) pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan *(disclosure)* atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan, pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Menurut Mardiasmo (2006) dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas financial, akuntabilitas manajerial merupakan bagian terpenting untuk menciptakan kredibilitas manajemen pemerintah daerah, tidak dipenuhinya prinsip pertanggungjawaban dapat menimbulkan implikasi yang luas, jika masyarakat menilai pemerintah daerah tidak *accountable*, masyarakat dapat menuntut pergantian pemerintahan, penggantian pejabat, dan sebagainya, rendahnya tingkat akuntabilitas juga meningkatkan risiko berinvestasi dan mengurangi kemampuan untuk berkompetisi serta melakukan efisiensi (Mardiasmo, 2006). Menurut Loina Lalolo Krina P (2003) adapun indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas :

1. Pembuatan keputusan memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar
2. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program
3. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan
5. Sistem manajemen dan mentoring hasil

2.1.3.1 Kinerja

Menurut Sondang Siagian (2002) penilaian kinerja berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, keletihan, kekurangan dan potensinya yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana dan pengembangan karirnya. Masih dalam Sondang Siagian (2002) sedangkan bagi organisasi, hasil penilaian kinerja sangat penting dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan tentang berbagai hal seperti identifikasi kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, rekrutmen, seleksi, program pengenalan, penempatan, promosi, sistem balas jasa, serta berbagai aspek lain dalam proses manajemen sumber daya manusia

Menurut Mulgan (1997) dalam Idhar Yahya (2006) pencapaian kinerja organisasi pemerintah biasanya memang dihubungkan dengan konsep 3E hal ini sesuai dengan konsep *Value For Money* yang merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas, namun tiga elemen ini saja sebenarnya tidak cukup dan perlu ditambah dengan dua elemen lain yaitu keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equility)*. Masih dalam Idhar Yahya maka artinya bahwa penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja tetapi dilakukan secara merata.

Menurut Achmad Djuaeni Kadmasasmita (2009) evaluasi kinerja yang dilakukan dalam rangka *pemantauan* pada pokoknya adalah menyediakan informasi bagi para pengelola kebijakan dan pembuat kebijakan mengenai ketepatan dan efektivitas kebijakan dan sistem serta proses pelaksanaannya, agar

dapat dilakukan tindak lanjut dini apabila secara aktual ternyata ada hal-hal yang perlu dikoreksi baik pada kebijakan atau pun pada sistem dan proses pelaksanaannya, langkah dan tujuan serupa juga dilakukan dalam rangka *pengawasan internal*, karena sebenarnya pemantauan merupakan bagian dari kegiatan *pengendalian internal* yang diperlukan untuk peningkatan efektivitas manajemen, peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber-sumber, dan perbaikan-perbaikan lainnya ke depan yang dapat meliputi kebijakan dan sistem serta proses pelaksanaannya, dengan kemungkinan terminasi atau pun ekstensi dan modifikasi kebijakan yang dilaksanakan.

Masih dalam Achmad Djuaeni Kadmasasmita (2009) evaluasi kinerja pada *pengawasan eksternal*, dilakukan dengan *tujuan* memberikan gambaran obyektif mengenai ketepatan dan efektivitas kebijakan ataupun sistem serta proses pelaksanaannya, kondisi biaya dan manfaat aktual dari kebijakan, perkembangan berbagai unsure dan indikator kinerja yang dicapai, yang diperlukan sebagai "pertanggungjawaban" atau pun "pertanggunggugatan" *(responsibility and or accountability)* suatu organisasi dalam melaksanakan tugas kelembagaannya, hal terakhir itu menunjukkan maksud (motif) dilakukannya evaluasi kinerja, yang tentu dipengaruhi pula oleh posisi dan peran lembaga pengawasan eksternal yang melakukan evaluasi tersebut, sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen pertanggungjawaban yang pada pokoknya terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban suatu instansi

pemerintah dalam pertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta misi organisasi.

Dalam Permen No. 9 Tahun 2007 indikator kinerja utama digunakan instansi pemerintah:

1. Perencanaan jangka menengah
2. Perencanaan jangka tahunan
3. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan
4. Pencapaian keberhasilan tujuan dan sasaran strategis

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian sebelumnya diantaranya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun Penelitian)	Judul Penelitian	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
Ponny Harsanti, Dwi Sudaryati dan Nora Hilmia / 2008 / ISSN : 1979-6889	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus	Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi secara parsial, diperoleh hasil sebagai berikut: Variabel kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Variabel pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem pelaporan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Variabel motivasi berpengaruh positif terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Membahas akuntabilitas	Hanya membahas akuntabilitas. Penelitian yang akan dilakukan akan membahas 1 variabel yaitu : factor – factor yang mempengaruhi akuntabilitas
Sukhemi/ 2010/ ISSN : 1978-1679	Pengaruh Penyajian Neraca Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah	Berdasarkan dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Penyajian neraca daerah berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah sebesar t = 2,781 dan p = 0,006. Hal ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan daerah dianggap akuntabel apabila memberikan informasi secara terintegrasi mengenai posisi asset, utang dan ekuitas dana pemda, serta memberikan informasi mengenai dampak pelasanaan anggaran.	Membahas neraca pemda terhadap akuntabiliatas keuangan daerah	Hanya membahas neraca pemda terhadap akuntabilitas. Penelitian yang akan dilakukan akan membahas 3 variabel yaitu: neraca pemda, akuntabilitas, kinerja

Budi Mulyana/ 2006/ ISSN : 0216-8642	Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	-Penyajian neraca daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini didukung dengan nilai t hitung sebesar 3,788 pada tingkat signifikan 0,000 yang berarti bahwa nilai t hitung tersebut lebih besar dari nilai t tabelnya. Adapun nilai t tabel (1-/2; n-*p*) = t tabel (0,975; 64) adalah 1,98. -Aksesbilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini didukung dengan nilai t hitung sebesar 4,784 pada tingkat signifiakansi 0,000 yang berarti nilai t hitung tersebut lebih besar dari nilai t tabelnya (1,98). -Penyajian neraca daerah dan aksesbilitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap aksestabilitas keuangan daerah. Hal ini didukung dengan nilai F hitung sebesar 31,225 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti bahwa nilai F hitung tersebut lebih besar dari F tabelnya. Adapun nilai F tabel (1-; *p*-1; n-*p*) = F tabel (0,95; 2; 64) adalah 3,075.	Membahas neraca pemda terhadap akuntabiliatas keuangan daerah	Penelitian yang akan dilakukan akan membahas 3 variabel yaitu : e-government, neraca pemda, dan akuntabilitas. tidak akan meneliti mengenai aksesbilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah
Arja Sadjiarto/ 2000	Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan	Pengukuran kinerja dibagi dalam tiga kategori indikator, yaitu (1) indicator pengukuran *service efforts*, (2) indikator pengukuran *service accomplishment*, dan (3) indikator yang menghubungkan antara *efforts* dengan *accomplishment*. Di samping itu perlu disampaikan juga penjelasan tertentu berkaitan dengan pelaporan kinerja ini (*explanatory information*). Pengukuran-pengukuran ini melaporkan jasa apa saja yang disediakan oleh pemerintah, apakah jasa tersebut sudah memenuhi tujuan yang ditentukan dan apa efek yang ditimbulkan terhadap penerima layanan/jasa tersebut . Dalam hal ini dicatat adanya manfaat pengukuran kinerja suatu entitas pemerintahan. Informasi mengenai kinerja pemerintah akan dapat digunakan untuk 1. Menetapkan sasaran dan tujuan program tertentu 2. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut 3. Mengalokasi sumber daya untuk pelaksanaan program 4. Memonitor dan mengevaluasi *results* untuk menentukan apakah ada kemajuan yang diperoleh dalam mencapai sasaran dan tujuan tersebut 5. Memodifikasi perencanaan program untuk meningkatkan kinerja Seperti halnya dengan keterbatasan pelaporan pengukuran kinerja lainnya, ada beberapa keterbatasan yang perlu dipahami oleh para pengguna pelaporan pengukuran kinerja ini agar informasi yang didapatkan dapat digunakan sebaikbaiknya.	Membahas akuntabilitas terhadap kinerja	Hanya terdapat dua variable dalam penelitian
Haris Faozan/ 2008	Penyusunan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara : Studi Proses Pada Badan Perencanaan	Mencermati perlu dan pentingnya Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka sudah saatnya seluruh jajaran instansi Pemerintah Psat dan Daerah menyusun dan menetapkan indicator kinerja utama dilingkungan instansinya. Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Bappeda Kota Bandung pada prinsipnya perlu mempertimbangkan berbagai dokumen relevan agar indicator kinerja utama yang disusun dapat lebih lengkap dan komprehensif, serta mempresentasikan kinerja konkret yang harus dicapai oleh Bappeda. Selain berbagai dokumen	Membahas mengenai kinerja pada perangkat daerah	Hanya membahas indicator kinerja Utama saja hanya terdiri dari satu variabel

	Pembangunan Daerah Kota Bandung	yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun Indikator Kinerja Utama Bappeda maupun SKPD yang lain, yang lain mutlak untuk memahami konsepsi dan teori perangkat daerah. Hal ini dikarenakan organisasi Perangkat Daerah terdiri dari beragam SKPD yang memiliki karakter fungsi masing-masing, di mana substansi dan orientasi indicator kinerja utamanya harus merujuk pada karakter fungsi tersebut.		
Desmiyawati & Wulan Witaliza	Pengaruh Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Organisasi (Studi Empiris Pada Rumah Sakit Swasta Di Provinsi Riau)	Dari hasil hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu : 1. Hasil pengujian terhadap hipotesis 1 menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja, dengan akuntabilitas publik sebagai variabel intervening. 2. Hasil pengujian terhadap hipotesis 2 menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja, dengan akuntabilitas publik sebagai variabel intervening.	Membahas Akuntabilitas Publik Membahas Kinerja	Tidak membahas mengenai Pengaruh Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern
Reynaldi Riantiarno & Nur Azlina	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu)	Dari hasil hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan yaitu : 1. Secara umum hasil pengujian validitas dan reliabilitas telah memberikan hasil yang baik dan patut dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya. Data dalam penelitian ini berdisribusi normal, semua model terbebas dari autokorelasi, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. 2. Variabel penerapan akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 3. Variabel ketaatan pada peraturan perundangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 4. variabel independen (ketaatan pada peraturan perundangan) yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 3,1% variasi variabel dependen (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah).	Membahas akuntabilitas dan kinerja	Hanya terdiri dari satu variabel
Jamason Sinaga, Ak., MAP	Penyajian Neraca Awal Pemda	Penyajian laporan keuangan diwajibkan bukan hanya bagi Pemda secara keseluruhan tetapi juga bagi SKPD sehingga penyajian neraca awal seharusnya adalah pada tingkat SKPD yang akan digabungkan menjadi neraca Pemda. Penyajian neraca tidak harus melalui inventarisasi fisik. Penyajian neraca bukan audit yang memerlukan langkah pengujian antara dokumen dengan fisik. Oleh karena itu kalau dokumen sudah lengkap maka dapat digunakan sebagai dasar penyajian neraca. Penyajian neraca awal dilakukan pada satu saat (titik waktu) tertentu. Penyajian seluruh pos neraca disajikan pada tanggal tersebut sehingga tidak dilakukan secara bertahap. Selanjutnya mengenai penilaian, Buletin Teknis Nomor 2 tidak mewajibkan penilaian oleh perusahaan penilai. Bahkan jika menggunakan perusahaan penilai hanya diperoleh satu informasi dari tiga informasi yang dibutuhkan dari tim yang kompeten di bidang aset tetap. Oleh karena itu penggunaan tim yang kompeten yang berasal dari entitas Pemda sendiri lebih baik. Buletin Teknis Nomor 2 mengatur langkah-langkah penyusunan neraca awal bagi Pemerintah Daerah. Dalam hal penyesuaian,	Membahas Neraca Pemda/Daerah	Hanya terdiri dari satu variabel saja

		langkah-langkah tersebut perlu dimodifikasi. Langkah penyesuaian harus diawali dari pembuatan petunjuk teknis sebagai pedoman dalam penyusunan neraca awal Pemda. Pelaksanaan penyajian dilakukan oleh tim sehingga perlu adanya pembentukan tim yang berasal dari berbagai pihak yang terkait. Agar ada pemahaman yang sama dalam tim maka perlu adanya penjelasan mengenai pekerjaan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data. Hasil pengolahan data dibandingkan dengan pos neraca yang sudah ada kemudian dibuatkan jurnal koreksi. Hasil terakhir dari kegiatan adalah adanya neraca yang sudah dikoreksi sesuai dengan SAP di tingkat SKPD dan juga di tingkat Pemda (SKPKD).		

2.2 Kerangka Pemikiran

Mencuatnya kasus korupsi di Indonesia membuat pemerintah memperbaharui semua sistem di tubuh sektor publik. Pembaharuan ini salah satunya dilakukan dalam penyajian laporan keuangan.

Penulis pada penelitian ini meneliti tentang penyajian neraca daerah terhadap akuntabilitas publik dan implikasinya terhadap kinerja. Laporan neraca daerah yang merupakan bagian dari laporan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting guna menunjang akuntabilitas yang harus dipenuhi, karena neraca merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang memuat informasi tentang posisi asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah pada periode tertentu. Informasi laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan. Informasi keuangan merupakan konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik dan laporan keuangan merupakan bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan publik.

Akuntabilitas dapat menjadi sarana untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan hasil dari kinerja yang selama ini dilakukan. Dengan kinerja yang baik maka akan menigkatkan pelayanan bagi masyarakat, hal ini dapat

meningkatkan nilai dari akuntabilitas instasi terkait di mata publik karena dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah di amanatkan sebelumnya oleh masyarakat.

2.2.1 Pengaruh Neraca Daerah Terhadap Akuntabilitas Publik

Menurut Wisnu (2007) kriteria-kriteria adanya akuntabilitas laporan keuangan :

1. Laporan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk terhadap penggunaan dan yang berasal dari masyarakat.
2. Laporan keuangan yang terdiri dari : neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan penjelasan atas laporan keuangan.
3. Laporan keuangan yang di sajikan harus tepat waktu.
4. Laporan keuangan tersebut di periksa oleh auditor yang independen yaitu BPK guna memastikan bahwa laopran itu disajikan dengan baik dan benar.
5. Pemerintah Daerah merespon dengan cepat terhadap hasil pemerikasaan oleh BPK.

   Dari kriteria diatas maka dapat disimpulan bahwa laporan neraca daerah yang merupakan bagian dari laporan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting guna untuk menunjang akuntabilitas yang harus dipenuhi, karena neraca merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang memuat informasi tentang posisi asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah pada periode tertentu. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan. Informasi keuangan merupakan konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik dan laporan keuangan merupakan bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan publik.

Tuntutan akuntabilitas publik terakait dengan perlu dilakukannya pemberi informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Dalam

penelitian Budi Mulyana (2006) penyajiaan neraca daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap upaya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Steccolini (2002) dalam Mulyana (2006) menyatakan bahwa laporan tahunan (laporan keuangan) meskipun belum melaporkan akuntabilitas secara keseluruhan dari entitas pemerintah, secara umum dipertimbangkan sebagai media utama akuntabilitas. Menurut Surat Edaran Permendagri No. 13 tahun 2006 pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD selaku wakil rakyat di daerah otonom, yang terlebih dahulu di periksa oleh BPK.

2.2.2 Pengaruh Akuntabilitas Publik Berimplikasi Terhadap Kinerja

Dalam Pusdiklatwas BPKP (2007:4-5) akuntabilitas juga dapat diuraikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau badan kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu, dalam konteks ini pengertian akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian dan tolok ukur pengukuran kinerja.

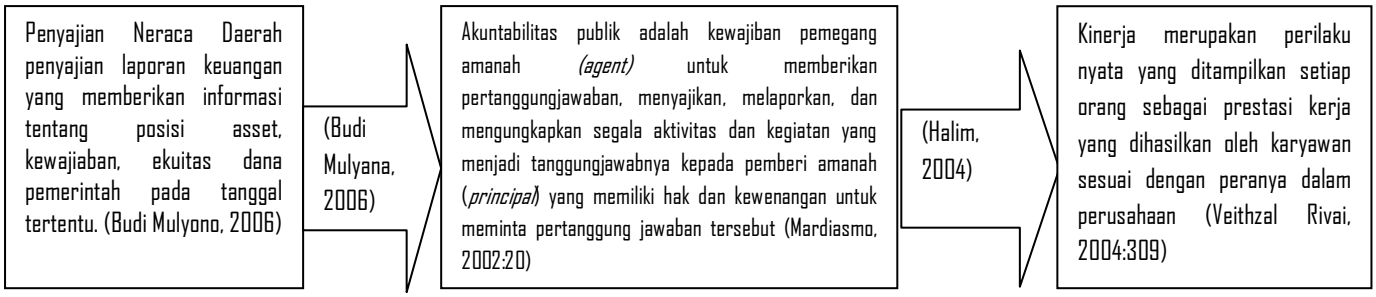
Halim (2004) dalam Ponny Harsanti, Dwi Sudaryati dan Nora Hilmia (2008) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi

informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya.

Menurut Ardja Satriatdjo (2000) beberapa teknik yang dikembangkan untuk memperkuat sistem akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh metode yang banyak dipakai dalam akuntansi, manajemen dan riset seperti *management by objectives*, anggaran kinerja, riset operasi, pengukuran kinerja dikelompokkan dalam tiga kategori indikator, yaitu (1) indicator pengukuran *service efforts*, (2) indikator pengukuran *service accomplishment*, dan (3) indikator yang menghubungkan antara *efforts* dengan *accomplishment*.

Masih menurut Ardja Satriatdjo (2000) kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil dari program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah, informasi yang paling dibutuhkan untuk menilai kinerja ini adalah pengukuran periodik atas perubahan jumlah dan sifat *net resources* dari organisasi yang bersangkutan dan informasi mengenai *service efforts and accomplishment*.

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik sebuah paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.2 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Husein Umar (2004:104) hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai permasalahan yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menunutun atau mengarahkan penyelidikan selanjutnya.

Dari kerangka pemikiran diatas maka penulis mengambil suatu dugaan atau hipotesis bahwa penyajiaan neraca daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas publik dan berimplikasi terhadap kinerja.

1 : penyajian neraca daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sudah baik

2 : akuntabilitas publik pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sudah baik

3 : kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sudah baik

4 : penyajian neraca daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

5 : akuntabilias publik berpengaruh terhadap kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat